



BNPB

Strategi Pencegahan Karhutla Inklusif dan Berkelanjutan: Perlindungan Kelompok Rentan dan Penguatan Kesiapsiagaan Komunitas

Narasumber:

Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B.

Direktur kesiapsiagaan BNPB



Diskusi Publik :
Sudah Jatuh, Tertimpa Asap



Kamis, 10 September 2026



BENCANA INDONESIA 2026

Jumlah kejadian bencana per tanggal 9 September 2026 tercatat sebanyak 1.764 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana hidrometeorologi 99,09% dan bencana geologi 0,91% dengan urutan bencana banjir, karhutla, cuaca ekstrem, kekeringan dan tanah longsor.

DAMPAK BENCANA ALAM

KORBAN BENCANA

MENINGGAL DUNIA	397
HILANG	13
LUKA - LUKA	2.110
MENDERITA & MENGUNSI	4.411.811

JENIS BENCANA ALAM

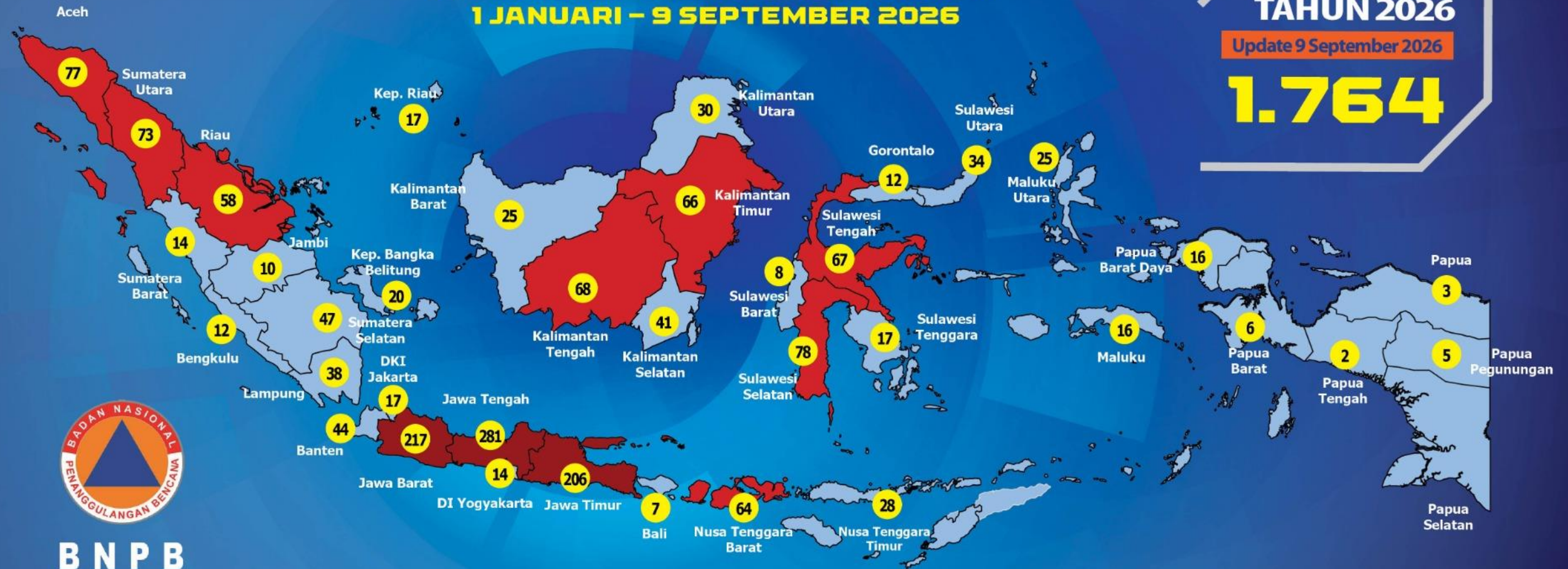
BENCANA GEOLOGI

GEMPA BUMI	13
ERUPSI GUNUNGAPI	3
TSUNAMI	-

BENCANA HIDROMETEOROLOGI

KARHUTLA	651
BANJIR	548
CUACA EKSTREM	324
KEKERINGAN	106
TANAH LONGSOR	105
GELOMBANG PASANG / ABRASI	14

SEBARAN KEJADIAN BENCANA ALAM 1 JANUARI - 9 SEPTEMBER 2026



TOTAL BENCANA TAHUN 2026

Update 9 September 2026

1.764

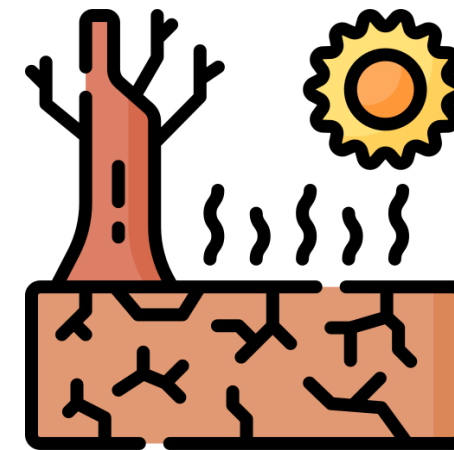
DAMPAK KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM

RUMAH RUSAK BERAT	29.143	SATUAN PENDIDIKAN RUSAK	2.361	KANTOR RUSAK	751
RUMAH RUSAK SEDANG	24.521	RUMAH IBADAT RUSAK	882	JEMBATAN RUSAK	92
RUMAH RUSAK RINGAN	57.869	FASILITAS YANKES RUSAK	230		

JUMLAH KEJADIAN

< 50
50 - 150
> 150

Bencana Hidrometeorologi Kering



PRA-BENCANA: Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)



- Salah satu bencana ekologis yang sering terjadi pada musim kemarau atau saat kondisi cuaca ekstrem.
- Menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu sistem pernapasan dan aktivitas masyarakat, serta menghambat transportasi dan penerbangan.



Kekeringan

- Bencana akibat berkurangnya ketersediaan air dalam jangka waktu panjang, umumnya karena curah hujan yang rendah atau tidak merata.
- Mengganggu produksi pertanian, penurunan ketersediaan air bersih, meningkatkan risiko kebakaran, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

PRA-BENCANA:

Pelaksanaan Tugas BNPB Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2020

Dukungan Dana Dalkarhutla
Kepada Pemda, K/L, **TNI, Polri**, Lemb. Kemasyarakatan, dan pihak lain yang dipandang perlu

Dukungan Sarpras Dalkarhutla
Berupa **operasi udara (termasuk OMC)** dan **operasi darat** pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

Fungsi Komando
Pengerahan sumber daya dalam pengkoordinasian penanggulangan karhutla



Kolaborasi Kegiatan

Peningkatan sosial ekonomi masyarakat secara terpadu bersama K/L, **TNI, Polri** dan masyarakat dikawasan rawan karhutla

Mendukung Kementerian LHK

Inventarisasi dan penyelesaian terhadap tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dalkarhutla

PRA-BENCANA:

Apel Kesiapsiagaan dan Dukungan Perlatan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia



- Koordinasi antar Kementerian/Lembaga serta Instansi pusat dan daerah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Pengecekan kesiapan dan kelengkapan **alat, perangkat, personil, sumber daya, dan anggaran** dalam menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan.
- BNPB mendukung **alat dan perlengkapan** kepada daerah yang menetapkan status siaga/tanggap darurat karhutla sebagai antisipasi kejadian bencana selama musim kemarau yang berpotensi karhutla
- Dukungan peralatan yang diberikan diantaranya pompa dan selang, APD pemadam, motor pemadam, dan alat komunikasi.



Penanganan Karhutla Tahun 2026

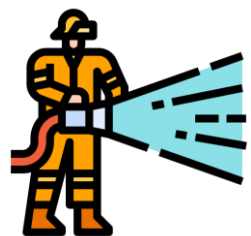
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menetapkan 6 (enam) provinsi sebagai provinsi prioritas penanganan karhutla

provinsi prioritas

No.	Provinsi	Lahan Terbakar (ha) Sipongi Kemenhut	Sudah Padam (ha)	Penanganan (ha)
1	Kalimantan Barat	38.310,86	38.065,24	245,62
2	Riau	15.738,92	15.560,77	178,15
3	Kalimantan Selatan	8.019,63	7.922,33	97,3
4	Kalimantan Tengah	7.634,46	7.608,64	26
5	Sumatera Selatan	1.926,23	1.539,43	386,8
6	Jambi	379	365,00	14
Total		72.009,10	71.060,23	948,87

Di luar provinsi prioritas

No.	Lokasi	Dalam Penanganan (ha)
1	IKN – Kalimantan Timur	458,0
2	Kabupaten Teluk Bintuni – Papua Barat	260,37
3	Kawasan Gunung Butak – Jawa Timur	16,5
4	TPA Putri Cempo (Kota Surakarta) - Jawa Tengah	4,6
5	Kawasan Gunung Ijen – Jawa Timur	2,5
Total		741,97



Dari total terbakar 72.009,10 ha, saat ini
seluas 948,87 ha yang masih belum padam

- **Karhutla** juga terjadi di beberapa wilayah lainnya seperti di **kawasan gunung dan tempat pembuangan akhir (TPA).**
- Tercatat **seluas 741,97 ha** lahan terbakar di luar 6 provinsi prioritas **masih dalam penanganan**

Upaya Pemadaman Tahun 2026

1. Operasi Darat

A. Provinsi Prioritas

- 1) **Mengerahkan personel gabungan** terdiri dari BNPB, BPBD, TNI-Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan Relawan dengan total personel **43.700 personel** dengan rincian:

- Kalimantan Barat	: 15.091 personel	- Sumatera Selatan	: 11.026 personel
- Kalimantan Tengah	: 4.686 personel	- Riau	: 1.913 personel
- Kalimantan Selatan	: 5.000 personel	- Jambi	: 5.984 personel
- 1) Diberikan **dukungan peralatan** yang terdiri dari pompa air, APD & pakaian pelindung, selang & konektor, peralatan pemadam manual/individu, alat komunikasi, penampung/tangki air, nozzle pemadam, tenda & lampu, alat berat/excavator, sepeda motor, mobil dapur lapangan, mobil water treatment, truk serba guna, mobil tangki air dan sebagainya.
- 2) Dukungan peralatan **akan terus diberikan/diperkuat** berdasarkan hasil analisa dan evaluasi serta kebutuhan di lapangan
- 3) **Kemhan, Kementan, Kemenhut, Kemen-LHK, Mabes TNI-Polri, serta K/L lainnya** juga memberikan bantuan personal dan peralatan operasi udara seperti selang, nozzle, sepatu dan aksesoris pendukung lainnya di Provinsi Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Sumsel

Upaya Pemadaman Tahun 2026

1. Operasi Darat

B. Provinsi Lainnya

- 1) **Kalimantan Timur (IKN):** Pemadaman melalui operasi darat secara terpadu (**324 personel**) oleh OIKN, BPBD, Manggala Agni, TNI/Polri & unsur lainnya serta didukung 1 unit helikopter *Water Bombing* dan OMC
- 2) **Maluku Utara:** Operasi darat oleh **30 personel** dibantu pelaksanaan OMC sehingga seluruh lahan terbakar **sudah padam**
- 3) **Papua Barat (Kab. Teluk Bintuni Kab. Papua Barat):** dilakukan pemadaman oleh satgas darat gabungan (**30 personel**) dan dibantu dengan pengerahan 1 unit helikopter.
- 4) **Jawa Tengah (TPA Putri Cempo, Kota Surakarta):** Sedang dipadamkan oleh satgas darat gabungan (**350 personel**) dibantu oleh OMC dan pengerahan 1 heli WB.
- 5) **Jawa Timur (Kawasan Gn. Bromo, Gn. Ijen dan Gn. Butak):** Kawasan Gn. Bromo sudah padam, untuk **Gn. Ijen dan Gn. Butak** sedang dilakuka operasi pemadaman oleh satgas darat (**2.040 personel**) dengan dibantu pengerahan 3 unit heli WB.

Upaya Pemadaman oleh Satgas Udara Tahun 2026

No	Provinsi	Patroli/Pesawat OMC (unit)	WB (unit)
1	Kalimantan Barat	5	9
2	Kalimantan Tengah	3	5
3	Kalimantan Selatan	3	7
4	Riau	2	7
5	Jambi	2	6
6	Sumatera Selatan	2	4
Total		17	38
		55 unit armada	

- **Total armada udara yang sedang beroperasi 55 unit** yang terdiri dari **17 heli patroli/pesawat cassa OMC dan 38 heli WB** yang tersebar di beberapa provinsi untuk pemadaman karhutla
- Armada udara yang sedang beroperasi di Sumatra sebanyak 23 unit dan di Kalimantan 32 unit.
- Untuk **kebakaran di provinsi lainnya** kebutuhan pesawat OMC dan heli WB masih menggeser/reposisi pesawat-pesawat yang sedang melaksanakan operasi udara di 6 provinsi prioritas (**tidak ada alokasi khusus**)



B N P B

Potret Krisis Karhutla 2026 & Tantangan Pengurangan Risiko Bencana



Dinamika Iklim 2026



- Ancaman kemarau ekstrim dan fenomena El Niño yang meningkatkan potensi eskalasi karhutla.



Fokus Dampak Kebijakan Pencegahan

- BNPB memandang pencegahan karhutla bukan sekadar memadamkan titik api, tetapi mengurangi risiko dan dampak multidimensional (kesehatan, sosial, dan ekonomi).
- Dampak kabut asap dan kerusakan lingkungan dirasakan lebih berat oleh kelompok tertentu (perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan Masyarakat Adat).

Komitmen BNPB: Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif (GEDSI)



Landasan Kebijakan

Penanggulangan bencana berbasis Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

- PERKA BNPB No. 14 Tahun 2014
- PERBAN BNPB PUG No. 2 Tahun 2026



Paradigma Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

- Kelompok rentan bukan sekadar "korban", melainkan subjek dan agen perubahan dalam mitigasi karhutla di tingkat tapak.
- Menjamin akses informasi early warning, fasilitasi mitigasi, dan sistem perlindungan bencana yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.



**Gender
Equality**



**Disability
Inclusion**



**Social
Inclusion**

Strategi Pencegahan BNPB dalam Penanganan Karhutla

1



Penguatan Sistem Peringatan Dini & Edukasi Inklusif

- Informasi peringatan dini karhutla dan potensi bahaya asap disebar secara cepat, ramah disabilitas, dan menjangkau wilayah terdepan.



2



Kemitraan Berbasis Komunitas & Kesiapsiagaan Lokal

- Pembentukan Destana berperspektif gender dan ramah disabilitas.
- Integrasi kearifan lokal dan hukum adat dalam tata kelola pembukaan lahan tanpa bakar yang aman dan terukur.



3



Modifikasi Cuaca & Pengendalian Lanskap Tapak

- Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai tindakan pencegahan dini.
- Pemantauan ketat pada wilayah rawan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua).



Merespons Dampak Spesifik pada Kelompok Rentan & Komunitas Adat



Perlindungan Kesehatan & Akses Informasi Terpencil

- Penguatan koordinasi bersama BPBD & Dinas Kesehatan daerah dalam penyediaan safe zone/shelter bebas asap yang ramah anak, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.



Mendukung Kearifan Lokal & Menghindari Kriminalisasi Masyarakat Adat

- Mendorong perlindungan terhadap praktik pengetahuan lokal pengolahan lahan tradisional yang ramah lingkungan.
- Memperjelas regulasi batas pembakaran terbatas berbasis kearifan lokal dan edukasi pencegahan, bukan pendekatan punitif/kriminalisasi.



Akses Evakuasi dan Layanan Khusus Disabilitas

- Penyiapan jalur evakuasi dan fasilitas pengungsian darurat yang terakses bagi penyandang disabilitas fisik maupun sensorik.



Aksi Kolaboratif



Ruang Kolaborasi (Multi-stakeholder Governance)

- Mengapresiai inisiatif masukan dari HWDI, KPI, MADANI Berkelanjutan, Pantau Gambut, dan CELIOS untuk penguatan data berbasis kondisi ril masyarakat.



Rekomendasi Tindak Lanjut untuk Pembuat Kebijakan & Pemda

1

Integrasi data kelompok rentan (disabilitas, lansia, perempuan hamil) ke dalam peta risiko bencana daerah (KRB).

2

Pengalokasian anggaran kesiapsiagaan daerah yang inklusif di provinsi rawan karhutla.

3

Penguatan mitigasi tata kelole ekosistem gambut berbasis partisipasi warga.



Melihat skala dan dampak karhutla 2026 yang semakin luas, bagaimana BNPB menilai tingkat kesiapsiagaan Indonesia saat ini,

dan di mana letak kesenjangan terbesar dalam sistem pencegahan, peringatan dini, serta respons di tingkat daerah dan masyarakat?



Penilaian Tingkat Kesiapsiagaan Indonesia

BNPB menilai kesiapsiagaan Indonesia terhadap karhutla 2026 berada pada **level cukup siap**, dengan fokus pada:



Kebijakan dan regulasi

Sudah ada (RAN-KARHUTLA, Inpres, Permendagri, dll).



Koordinasi lintas sektor dan kelembagaan

BNPB, KLHK, TNI/Polri, Pemda, dunia usaha, masyarakat.



Peningkatan teknologi dan sistem monitoring

Satelit, hotspot, early warning.



Pengalaman dan pembelajaran

Dari kejadian tahun-tahun sebelumnya.



Namun, kesiapsiagaan masih belum merata, terutama di tingkat daerah dan masyarakat.



Kesiapsiagaan yang kuat butuh kolaborasi semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat.



Letak Kesenjangan Terbesar



Pencegahan

Masih terbatasnya pengelolaan lahan gambut, penegakan hukum, dan alternatif ekonomi masyarakat.



Di tingkat daerah

- Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
- Terbatasnya sarana prasarana (alat, personel, anggaran).
- Koordinasi antar sektor belum solid.



Di masyarakat

- Masih ada praktik pembakaran untuk membuka lahan.
- Rendahnya kesadaran dan kapasitas alternatif penghidupan.



Peringatan Dini

Sistem peringatan dini sudah tersedia, namun belum sepenuhnya terjangkau dan dimanfaatkan di tingkat lokal dan oleh masyarakat.



Di tingkat daerah

- Belum meratanya akses informasi dan teknologi (monitoring, komunikasi).
- Kapasitas SDM dan operasional posko masih terbatas.



Di masyarakat

- Informasi belum cepat diterima dan dipahami.
- Keterbatasan alat komunikasi dan literasi bencana.



Respons

Respons darurat sudah berjalan baik di beberapa wilayah, namun masih terkendala pada kecepatan, akses, dan koordinasi, terutama di daerah terpencil.



Di tingkat daerah

- Keterbatasan armada, peralatan, dan logistik.
- Akses wilayah sulit (lahan gambut, hutan, medan berat).
- Koordinasi antar instansi belum sepenuhnya efektif.



Di masyarakat

- Kesiapsiagaan dan pelatihan masih rendah.
- Keterbatasan peralatan sederhana (masker, alat pelindung, evakuasi).
- Informasi dan jalur evakuasi belum jelas di semua desa.



Kesimpulannya, Indonesia sudah cukup siap, tetapi kesenjangan terbesar ada pada **penguatan pencegahan di tingkat daerah dan masyarakat, peningkatan sistem peringatan dini yang lebih inklusif, serta respons yang lebih cepat, merata, dan berkelanjutan hingga ke wilayah terpencil.**



BNPB memastikan sistem kesiapsiagaan dan penanganan karhutla secara khusus melindungi kelompok rentan

Termasuk perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang bergantung pada hutan dan lahan, baik dari sisi keselamatan, kesehatan, evakuasi, maupun keberlanjutan penghidupan.

Tidak ada yang tertinggal



Keselamatan



Peringatan dini dan informasi risiko karhutla yang mudah diakses oleh semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas.



Penyediaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai kebutuhan (mis. masker, helm, pelindung khusus).



Pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan dengan pendekatan inklusif (gender, usia, disabilitas).



Kesehatan



Layanan kesehatan darurat dan pos kesehatan di lokasi pengungsian.



Pemantauan kesehatan khusus untuk kelompok rentan (misal: ibu hamil, anak, lansia, penyandang disabilitas).



Dukungan psikososial untuk mengurangi stres dan trauma.



Evakuasi



Jalur evakuasi dan transportasi yang ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, anak, dan ibu hamil.



Tempat pengungsian yang aman, nyaman, inklusif, dengan fasilitas khusus (aksesibilitas, sanitasi, ruang laktasi, area bermain anak).



Koordinasi dengan pemerintah daerah, relawan, dan komunitas lokal untuk evakuasi yang cepat dan tepat sasaran.



Keberlanjutan Penghidupan



Pendampingan pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak (mis. pertanian, perikanan, kehutanan non-kayu).



Bantuan ekonomi dan akses pada program pemulihan serta pelatihan keterampilan.



Pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan bersama masyarakat, agar risiko karhutla dapat ditekan di masa depan.



Dengan pendekatan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan, **BNPB memastikan setiap kelompok rentan terlindungi dan tetap dapat hidup aman, sehat, dan sejahtera** meski di tengah ancaman karhutla.



Karhutla adalah krisis yang berulang.

Apakah dukungan kebijakan dan alokasi anggaran BNPB saat ini sudah lebih banyak diarahkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan dibandingkan respons darurat dan pemadaman?

Belum sepenuhnya. Saat ini dukungan masih lebih besar pada penanganan darurat dan pemadaman, sementara pencegahan dan kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan.

Saatnya bergeser dari memadamkan api ke mengurangi risiko sejak hulu



Gambaran Saat Ini

(berdasarkan pola umum alokasi & program BNPB)



Respons darurat dan pemadaman

- Penanganan bencana
- Operasi pemadaman
- Logistik dan rehabilitasi



Pencegahan dan kesiapsiagaan

- Penguatan regulasi & tata kelola
- Patroli, deteksi dini, peringatan
- Edukasi & pemberdayaan masyarakat
- Restorasi gambut dan ekosistem



Proporsi bisa berbeda tiap tahun dan program, namun secara umum porsi untuk respons darurat dan pemadaman masih lebih besar.



Kenapa Masih Begitu?



Dampak cepat terlihat

Pemadaman memberi hasil instan dan mudah diukur.



Tekanan publik dan politik

Saat terjadi asap dan kebakaran, tuntutan respons darurat meningkat.



Keterbatasan kapasitas daerah

Pencegahan membutuhkan waktu, SDM, dan infrastruktur yang lebih kuat.



Alokasi anggaran belum proporsional

Program pencegahan dan kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan.



Apa yang Perlu Dilakukan?

Agar pendekatan karhutla bergeser ke pencegahan sejak hulu



Perubahan Kebijakan

- Perkuat regulasi pencegahan karhutla (pengendalian pembukaan lahan, tata ruang, perlindungan gambut).
- Integrasikan karhutla dalam kebijakan iklim, kehutanan, dan pembangunan berkelanjutan.
- Dorong penegakan hukum yang konsisten dan tegas.



Penganggaran yang Lebih Seimbang

- Tingkatkan porsi anggaran untuk pencegahan & kesiapsiagaan (deteksi dini, patroli, restorasi, edukasi, teknologi).
- Alokasikan dana jangka menengah-panjang untuk pengurangan risiko dan pemulihan ekosistem.
- Manfaatkan pembiayaan inovatif (green fund, kerja sama internasional, CSR, kemitraan multipihak).



Tata Kelola yang Lebih Terintegrasi

- Kolaborasi pusat-daerah-hingga desa (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi).
- Penguatan data, sistem peringatan dini, dan teknologi (satelit, hotspot).
- Pemberdayaan masyarakat dan pelibatan sektor swasta dan masyarakat adat/peduli gambut.



Tujuan Akhir:

Risiko karhutla berkurang, masyarakat lebih aman, lingkungan tetap lestari.



Hulu

Perlindungan hutan, gambut, dan lahan



Tengah

Kesiapsiagaan, kolaborasi, edukasi



Hilir

Respons cepat dan efektif



Hasil

Risiko menurun, ekosistem pulih, kehidupan berkelanjutan